

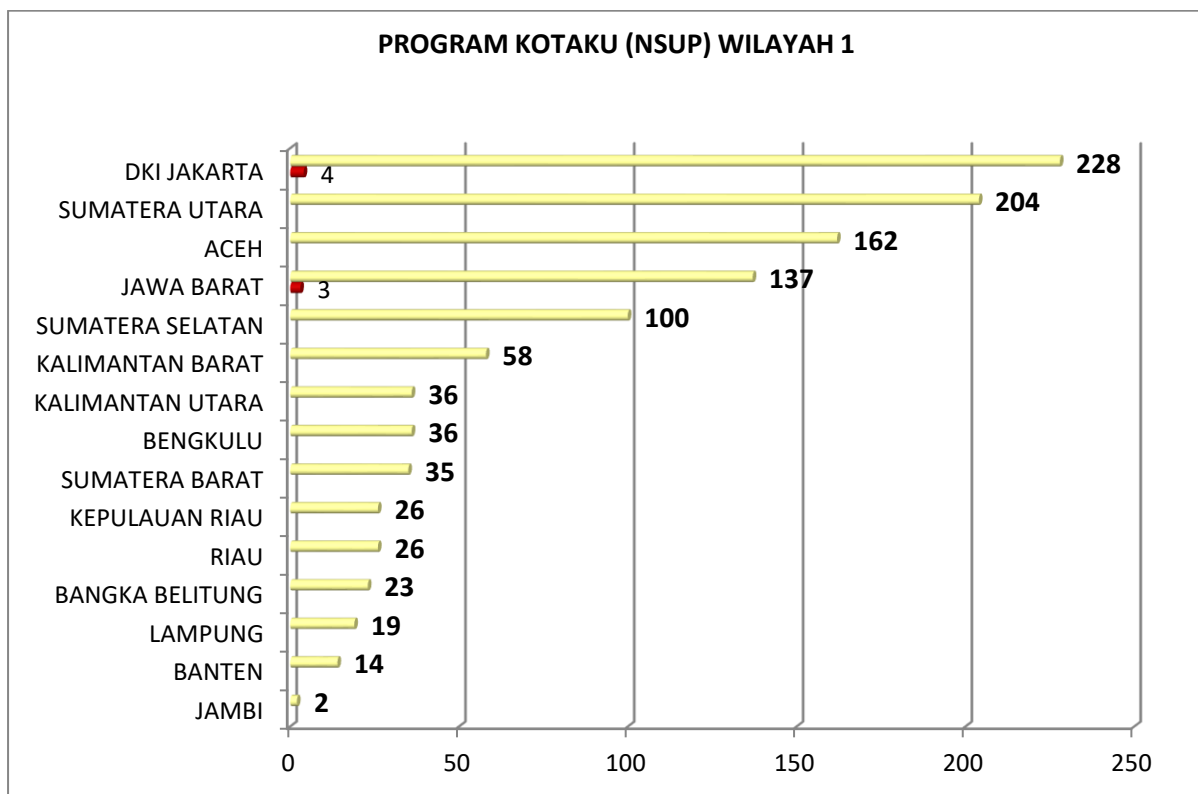
PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH (PIM) PROGRAM KOTAKU WILAYAH-1

Pengelolaan Informasi dan Masalah Bulan Juni 2018

Gambaran Umum

Secara umum pengaduan dalam program Kotaku (NSUP) di wilayah I telah mengalami kenaikan dari segi jumlah aduan yang masuk maupun dari segi capaian progres penanganannya. Pada bulan Juni 2018 jumlah aduan yang masuk sebanyak 1113 pengaduan (dari bulan sebelumnya sebanyak 1093 aduan) dan progres penanganan telah selesai 1106 (99,4%) dan yang masih proses sejumlah 7 aduan (0,6%). Pengaduan yang tertinggi pada bulan ini terjadi di DKI Jakarta berjumlah 232 pengaduan, berikutnya Sumatera Utara 204 aduan. sedangkan terendah di Provinsi Jambi sebanyak 2 pengaduan. Keterangan lebih rinci dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini :

Grafik 1. Jumlah Pengaduan Tiap Provinsi, bulan Juni 2018



Pengaduan berdasarkan Sifat dan Kategori

Berdasarkan Sifat dan Kategori, pengaduan yang **bersifat Informatif/administratif** berjumlah **1103 pengaduan (99,10%)**, Sedangkan yang **bersifat masalah** sebanyak **10 aduan (0,89%)**. Pengaduan pada lingkup keuangan atau kategori **Penyalahgunaan Dana** terdapat 3 pengaduan (0,2%). Selanjutnya dari segi Informasi/administrasi yang terbanyak atau mayoritas adalah **kategori Pertanyaan** yaitu berjumlah **1023 aduan (91,9%)**, kategori **Saran** berjumlah 49 aduan (4,4%) dan kategori Kritik berjumlah 31 aduan (2,7%). Untuk pengaduan bersifat masalah dengan rincian kategori Penyimpangan prinsip dan Prosedur 2

**PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH (PIM)
PROGRAM KOTAKU WILAYAH-1**

aduan, Perubahan Kebijakan 1 aduan dan Kode Etik adalah berjumlah 4 aduan. Sedangkan kategori intervensi negatif dan force majeure sama-sama berjumlah 0 aduan. Selanjutnya secara detail dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2:

Tabel Jumlah Pengaduan Berdasarkan Sifat Pengaduan (Informatif & Masalah) PROGRAM KOTAKU (NSUP) Wilayah 1 Bulan Juni 2018				
INFORMATIF				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Kritik	30	1	31
2	Saran	49	-	49
3	Pertanyaan	1,017	6	1,023
Sub Total		1,096	7	1,103
MASALAH				
NO.	KATEGORI	SELESAI	PROSES	TOTAL
1	Mekanisme & Prosedur	2	-	2
2	Penyimpangan Dana	3	-	3
3	Intervensi Negatif	-	-	-
4	Perubahan Kebijakan	1	-	1
5	Kode Etik	4	-	4
6	Force Majeur	-	-	-
Sub Total		10	-	10
TOTAL		1,106	7	1,113
Persentase		99.4%	0.6%	

Dari data di atas, bila kita cermati bahwa perbandingan antara jumlah pengaduan yang bersifat **informatif/Administrasi** jauh lebih besar jumlahnya daripada pengaduan yang bersifat **Masalah** yaitu **99,10% (1103) : 0,89% (10 aduan)** dan Mayoritas adalah berupa kategori **Pertanyaan** berjumlah **1023 (91,9%)**.

Pengaduan berdasarkan Rasio Kelurahan sasaran

Pengaduan bila dilihat dari segi rasio perbandingan jumlah kelurahan dengan jumlah pengaduan yang masuk di tiap provinsi, maka dari 15 provinsi persentase tertinggi adalah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 95% dengan rincian jumlah lokasi sasaran 38 kelurahan dan pengaduan yang masuk jumlahnya 36. Dan Provinsi DKI sebesar 89%.. Sedangkan persentase terendah atau rasio kelurahan lebih kecil daripada pengaduan yang masuk adalah Provinsi Jambi sebesar 3% dengan rincian jumlah lokasi sasaran 80 kelurahan, sementara pengaduan yang masuk adalah 2 aduan. Selengkapny dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3 : Perbandingan Rasio Jumlah Kelurahan dan Jumlah Pengaduan setiap
Lokasi Per Provinsi
Periode 1-31 Juni 2018**

**PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH (PIM)
PROGRAM KOTAKU WILAYAH-1**

Provinsi	Jml Kel	Jml Pengdn	Jml %	Selesai	Jml %	Proses	Jml %
ACEH	426	162	38.0	162	100.0	-	-
KALIMANTAN UTARA	38	36	95	36	100.0	-	-
SUMATERA UTARA	621	204	33	204	100.0	-	-
SUMATERA BARAT	355	35	10	35	100.0	-	-
RIAU	127	26	20	26	100.0	-	-
JAMBI	80	2	3	2	100.0	-	-
SUMATERA SELATAN	307	100	33	100	100.0	-	-
BENGKULU	131	36	27	36	100.0	-	-
LAMPUNG	184	19	10	19	100.0	-	-
BANGKA BELITUNG	104	23	22	23	100.0	-	-
KEPULAUAN RIAU	109	26	24	26	100.0	-	-
DKI JAKARTA	261	232	89	228	98.3	4	-
JAWA BARAT	1,701	140	8	137	97.9	3	-
BANTEN	392	14	4	14	100.0	-	-
KALIMANTAN BARAT	88	58	66	58	100.0	-	-
Total	4,924	1,113	23	1,106	99.4	7	0.6

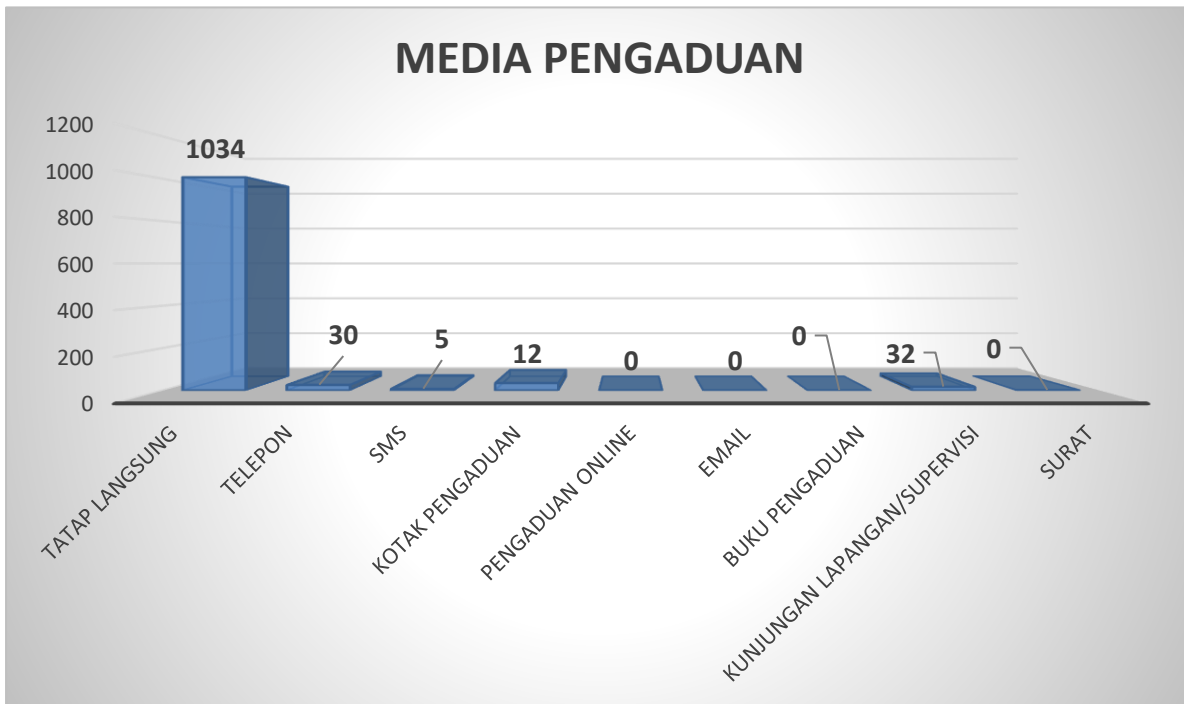
Dari data di atas, dapat di cermati perbandingan rasio jumlah kelurahan sasaran dengan jumlah pengaduan yang masuk per provinsi sebagai berikut: ada yang jumlah pengaduan sebenarnya cukup besar namun persentasenya rasio tergolong kecil karena jumlah kelurahannya sasaran besar seperti (Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Jawa Barat), dan ada yang jumlah rasio pengaduannya tergolong besar meski jumlah pengaduan yang masuk sebenarnya kecil karena jumlah kelurahan sasaran kecil seperti (Provinsi Kaltara, dan DKI).

Pengaduan Berdasarkan Media

Secara Garis besar bila dilihat berdasarkan media, pengaduan yang paling dominan di bulan Juni 2018 di wilayah KMP 1 dari beberapa media yang ada yaitu ada pada **media tatap langsung** sebanyak **1034 (92,90%)** pengaduan, media lain yang cukup digunakan untuk menyampaikan pengaduan adalah telepon sebanyak 30 aduan (2,69%) dan supervisi sebanyak 32 (2,87%) pengaduan. Sedangkan media Kotak pengaduan sejumlah 12 aduan (1,07%) dan melalui SMS sejumlah 5 (0,44%). Sedangkan media yang sangat rendah di gunakan yaitu media Buku pengaduan, surat, website, WhatsApp dan email (0) pengaduan. Hal tersebut dapat di lihat dalam Grafik di bawah ini :

Grafik 2. Penggunaan Media Pengaduan Digunakan Periode Juni 2018

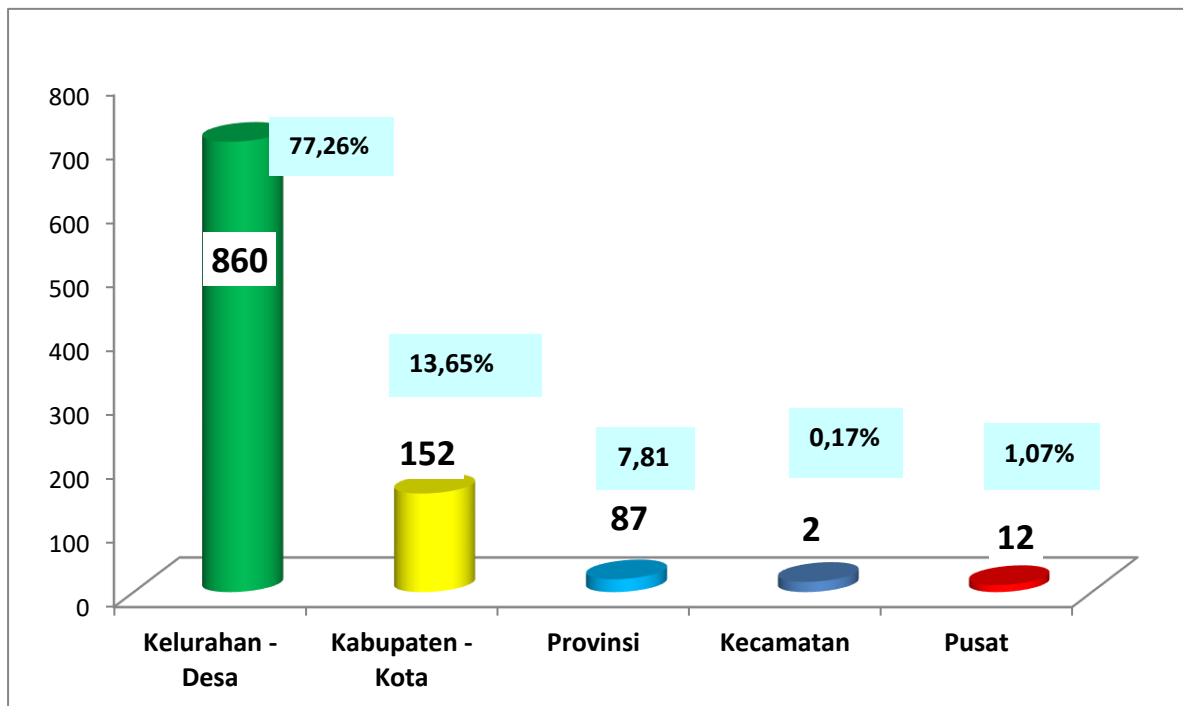
PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH (PIM) PROGRAM KOTAKU WILAYAH-1



Pengaduan Berdasarkan Derajat Aduan

Secara garis besar berdasarkan derajat, pengaduan yang lebih banyak adalah pada tingkat kelurahan/desa yang mencapai 860 aduan (77,26%), Pengaduan pada derajat Kabupaten sebanyak 158 (13,65%), sedangkan pengaduan pada Derajat tingkat Provinsi sebanyak 87 aduan (0%). Pengaduan pada Derajat tingkat Kecamatan sebanyak 2 aduan (0,17%) dan pengaduan pada tingkat pusat sebanyak 12 aduan (1,07%).

Grafik 3. Derajat Pengaduan, Periode Juni 2018



PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH (PIM) PROGRAM KOTAKU WILAYAH-1

Pengaduan Berdasarkan Bidang Pelaksanaan

Berdasarkan bidang kegiatan program bahwa Partisipasi masyarakat lebih dominan mencapai 661 pengaduan (59,4%). Untuk Bidang Management Proyek terdapat pengaduan sebanyak 326 (29,3%), Sedangkan bidang program Partisipasi Pemda sebanyak 109 (9,8%) dan bidang program pelaksanaan kegiatan yang kasusnya terendah pada kategori pengawasan 17 kasus (1,52%).

Grafik 4. Pengaduan Berdasarkan Bidang Program (Periode 1-30 Juni 2018)



Pengaduan berdasarkan bidang Manajemen Proyek terdapat di semua provinsi, kecuali Provinsi Jambi. Pengaduan terbanyak di Provinsi DKI Jakarta yaitu 112 pengaduan. Sedangkan pengaduan manajemen proyek terendah di Provinsi Jambi 0 pengaduan, sedangkan Kepulauan Riau berjumlah 2 dan Riau sebanyak 4 kasus.

Bidang kegiatan partisipasi masyarakat merata di semua provinsi. Pengaduan paling dominan dari Provinsi Sumatera Utara sebanyak 111 pengaduan dan terendah di Provinsi Jambi sebanyak 2 kasus. Kegiatan partisipasi pemda sebanyak 109 kasus dari total pengaduan dan pada pelaksanaan pengawasan terdapat 17 kasus dan hanya terjadi di 9 provinsi. Beberapa provinsi tidak ada sama sekali aduan seperti provinsi Aceh, Jambi, sumsel, Banten yaitu 0 pengaduan. Keterangan lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 4. Rincian Pengaduan Berdasarkan Bidang Program

**PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH (PIM)
PROGRAM KOTAKU WILAYAH-1**

PROPINSI	Manajemen Proyek	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi Pemda	Pengawasan	Grand Total
ACEH	24	91	46	0	161
KALIMANTAN UTARA	13	14	7	2	36
SUMATERA UTARA	38	132	10	2	182
SUMATERA BARAT	9	36	1	2	48
RIAU	4	20	1	2	27
JAMBI		2	0	0	2
SUMATERA SELATAN	32	66	2	0	100
BENGKULU	5	27	3	1	36
LAMPUNG	5	12	1	1	19
BANGKA BELITUNG	6	17	0	0	23
KEPULAUAN RIAU	2	21	2	1	26
DKI JAKARTA	112	98	24	3	237
Jawa Barat	49	72	4	3	128
BANTEN	5	5	4	0	14
KALIMANTAN BARAT	22	48	4	0	74
GRAND TOTAL	326	661	109	17	1113

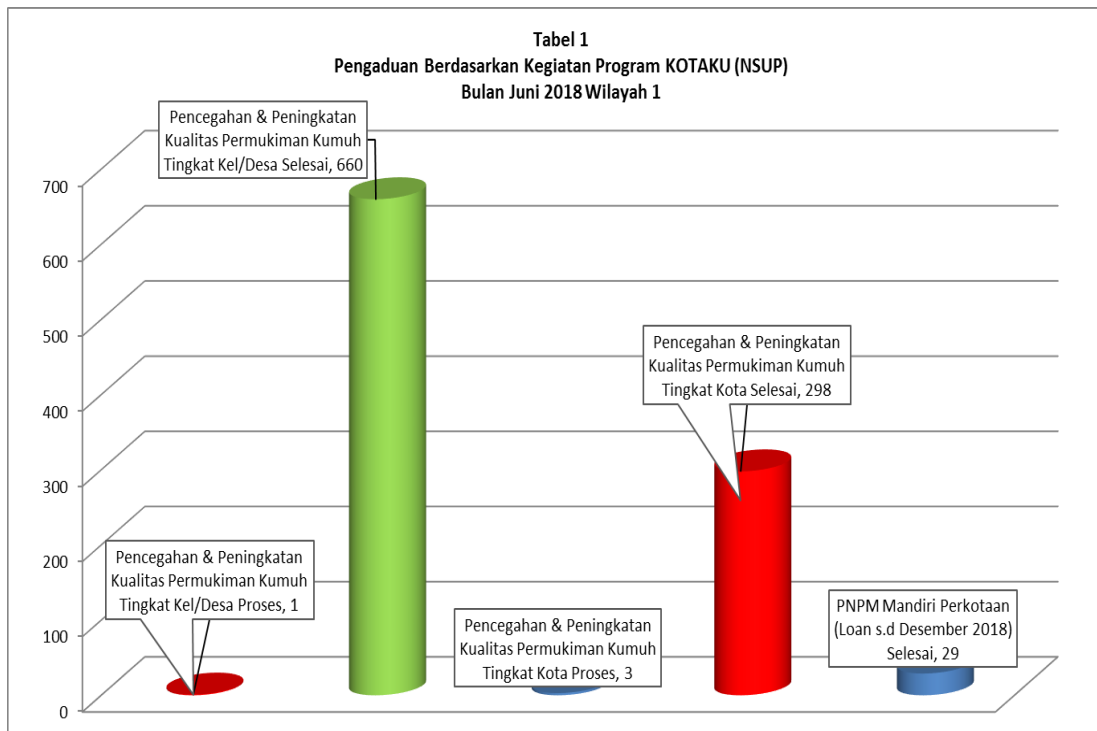
Apabila dilihat dari bidang program dan sumber pengaduan, maka bidang partisipasi masyarakat dengan sumber pengaduan di tingkat kelurahan/desa adalah yang paling tinggi. Sedangkan terendah adalah pengaduan partisipasi pemda dan Pengawasan yang bersumber dari pengaduan di tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan/desa.

Pengaduan Berdasarkan Program Kegiatan

Pada periode bulan Juni 2018, pengaduan yang berkaitan dengan program kegiatan berdasarkan **skala tingkat kelurahan** lebih tinggi sebanyak **711 aduan (65,05%)**. Pengaduan yang berkaitan dengan program kegiatan berdasarkan skala tingkat kota/kabupaten mencapai 295 pengaduan atau sebesar 26,98%. Sementara pengaduan yang berkaitan dengan program KOTAKU Eks. Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan **71 kasus (6,4%)**.

Grafik 5. Pengaduan Berdasarkan Kegiatan Program

PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH (PIM) PROGRAM KOTAKU WILAYAH-1



Pengaduan terkait program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala tingkat kelurahan tertinggi terdapat di DKI berjumlah 232 dan Sumatera Utara 204 pengaduan. Dan yang terendah terdapat di Provinsi Jambi sebanyak 2 pengaduan.

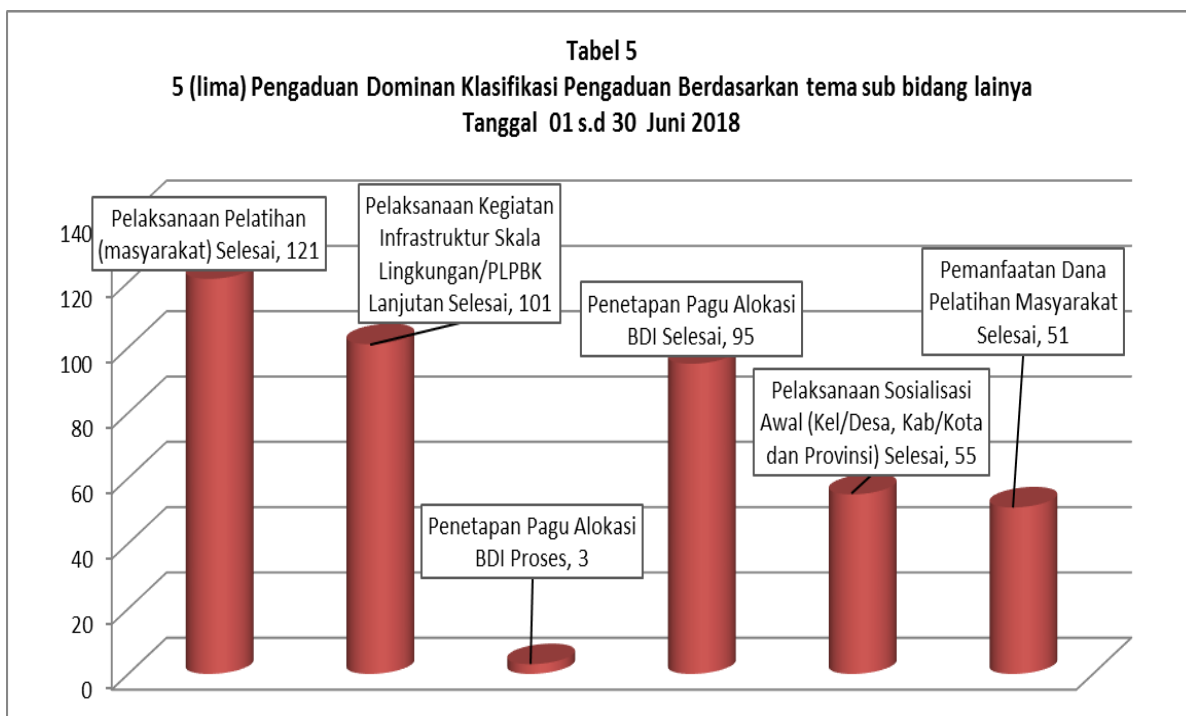
Berdasarkan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota merata terdapat pengaduan di semua provinsi. Pengaduan tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta 116 pengaduan dan Aceh 56 aduan. Sedangkan yang terendah terdapat di Provinsi Jambi, sebanyak 1 pengaduan atau (0,1%).

Sedangkan berdasarkan Eks. Kegiatan Program PNPM Mandiri Perkotaan dari total 23 pengaduan. tertinggi di Provinsi Bengkulu 6 pengaduan. Sementara pengaduan terendah Provinsi Jambi dan Lampung 1 pengaduan.

Pengaduan Berdasarkan Dominan Sub Tema Bidang Kegiatan

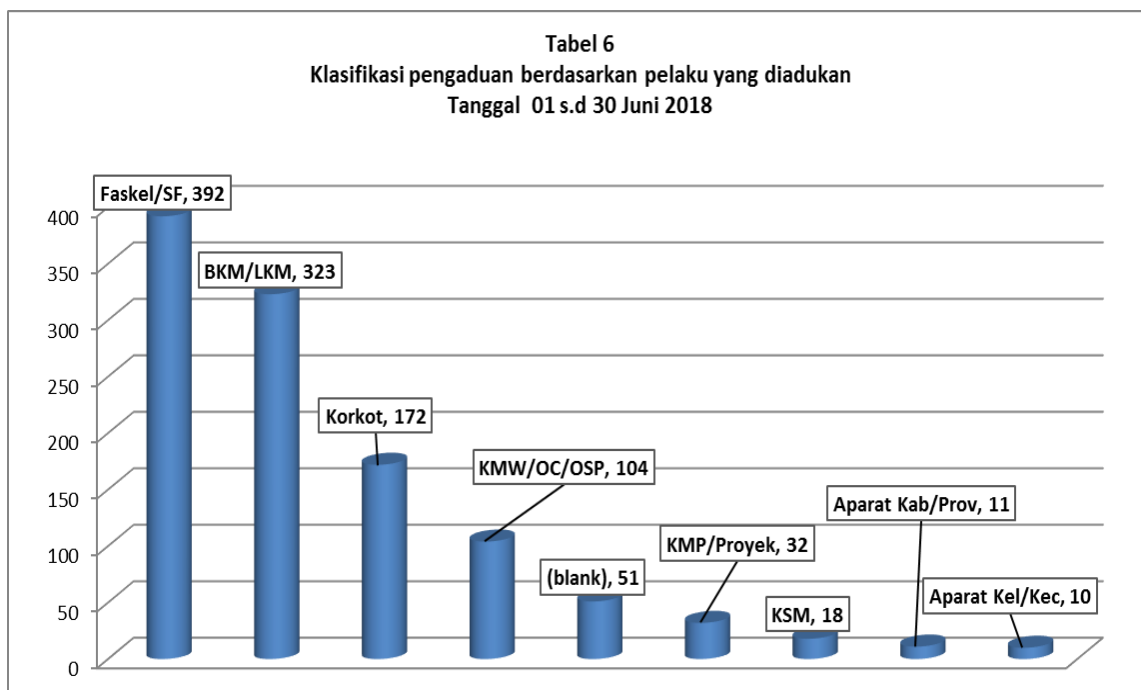
Secara Garis Besar pengaduan berdasarkan sub bidang kegiatan yang dominan adalah terkait pelatihan Masyarakat (121 aduan/10,87%), Infra struktur skala Lingkungan (101 aduan/9,07%), Penetapan alokasi BDI (98 aduan/8,80%) , Pelaksanaan Sosialisasi Awal sebanyak (55 aduan/4,94%) dan Pemanfaatan dana Pelatihan Masyarakat (51 aduan/4,58%). Hal tersebut detail di bawah ini:

PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH (PIM) PROGRAM KOTAKU WILAYAH-1



Pengaduan Berdasarkan Teradu

Secara garis besar pengaduan berdasarkan pelaku yang di adukan (Teradu) adalah dapat diberikan penjelasan bahwa pelaku yang tertinggi teradu yaitu Faskel/SF berjumlah 392 (35,22%) aduan. Selanjutnya tertinggi kedua adalah BKM/LKM berjumlah 323 (29,02%) aduan. Dan Urutan tertinggi ke tiga adalah Korkot sebesar 172 (15,45%) aduan. Adapun sebagai pihak teradu terendah adalah aparat Kecamatan sejumlah 10 (0,89%). Hal di atas dapat di lihat secara detail dalam grafik dibawah ini :



PENGELOLAAN INFORMASI DAN MASALAH (PIM) PROGRAM KOTAKU WILAYAH-1

Pengaduan Berdasarkan Jenis Kelamin Pengadu

Secara mayoritas bahwa pengaduan banyak dilakukan oleh kaum Laki-laki sebesar 807 aduan (72,50%), dan sebagai pengadu oleh kaum perempuan adalah sebesar 306 aduan (27,49%). Pengadu tertinggi laki- laki adalah dari provinsi DKI sebesar 194 pengadu, dan Sumatera Utara sebesar 145 pengadu. Sedangkan pengadu laki-laki terendah adalah provinsi Jambi yaitu sejumlah 2 pengadu. Kemudian pengadu Perempuan terbanyak adalah Aceh sebesar 78 dan Provinsi Sumut sebesar 59 pengadu. Dan pengadu perempuan terendah adalah banten 2 dan Jambi 0 pengadu. Selebihnya sebagian pengadu tidak diketahui jenis kelaminnya. Selanjutnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 7. Pengaduan berdasarkan Jenis kelamin Pengadu

PROVINSI	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
ACEH	84	78	162
KALIMANTAN UTARA	24	12	36
SUMATERA UTARA	145	59	204
SUMATERA BARAT	24	11	35
RIAU	17	9	26
JAMBI	2		2
SUMATERA SELATAN	81	19	100
BENGKULU	25	11	36
LAMPUNG	18	1	19
BANGKA BELITUNG	13	10	23
KEPULAUAN RIAU	16	10	26
DKI JAKARTA	194	38	232
JAWA BARAT	104	36	140
BANTEN	12	2	14
KALIMANTAN BARAT	48	10	58
GRAND TOTAL	807	306	1113

Demikian penjelasan laporan naratif terhadap perkembangan pengaduan selama bulan Juni 2018 , baik gambaran dan penjelasan secara Kuantitatif maupun kualitatif dari berbagai aspek Katagori, derajat, media, pengadu, Jenis kelamin, kegiatan program maupun status penyelesain dan proses dari masing-masing provinsi pada level kabupaten/kota maupun tingkat kelurahan/ desa.